

Judul : Warga Sulit Cari Keadilan
Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Tanah Adat Papua Diserobot Pengusaha Warga Sulit Cari Keadilan

Anggota Komisi X DPR Robert J Kardinal menyayangkan masih sulitnya bagi masyarakat Papua mencari keadilan atas tanahnya. Walhasil, tak sedikit warga Papua terpaksa harus ke Jakarta hanya untuk menjemput keadilan.

ROBERT mengatakan, masyarakat adat di Boven Digoel dan Kabupaten Sorong bersusah payah sampai ke Jakarta hanya untuk mencari keadilan.

"Berapa ribu kilometer yang harus mereka tempuh untuk menjemput keadilan," kata dia menyikapi aksi demonstrasi puluhan masyarakat adat Papua, suku Awyu di Boven Digoel dan suku Moi di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, pekan lalu.

Lewat aksi damai di depan kantor para wakil Tuhan ini, mereka berharap MA menjatuhkan putusan hukum yang dapat melindungi hutan adat mereka. Masyarakat adat ini tengah terlibat gugatan lantaran tanah adat mereka diserobot sejumlah perusahaan sawit asal Jakarta. Gugatan kedua suku ini kini telah sampai tahap kasasi di MA.

Khusus Suku Awyu, mereka menggugat kasasi tiga perusahaan sawit yang beroperasi di Boven Digoel, yakni PT Indo Asiana Lestari (IAL), terkait izin kelayakan lingkungan hidup seluas 36.094 hektare yang dikeluarkan Pemerintah. Kemudian PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya.

Sementara Suku Moi, mengajukan gugatan kepada PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) atas 18.160 hektare hutan adat untuk perkebunan sawit. PT SAS sebelumnya memegang konsesi seluas 40 ribu hektare di Sorong.

Namun pada 2022, Pemerintah Pusat mencabut izin pelepasan kawasan hutan PT SAS, disusul dengan pencabutan izin usaha. Masalah hutan adat tersebut kini masuk di PTUN Jakarta.

Robert menilai, banyak sengketa hukum antara masyarakat adat di Papua dan pelaku usaha di perkebunan lantaran sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat. Padahal, seluruh tanah di Papua itu, ada pemiliknya, masyarakat adat di sana. Hak masyarakat adat Papua tidak hanya dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, tapi juga oleh hukum internasional.

"Bagaimana seorang dari Jakarta, mungkin pemiliknya nggak pernah tinggal di Jakarta, mungkin di Singapura, Hong Kong, bisa mengklaim ribuan hektare tanah adat masyarakat yang hidupnya sengsara di pinggir hutan itu," tegasnya.



Robert J Kardinal

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah mengambil sikap atas sengketa lahan antara masyarakat adat Papua dengan pelaku usaha perkebunan. Apalagi masyarakat adat di Papua, sama sekali tidak mengetahui jika hutan adat mereka akan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan sawit.

"Jadi jangan hanya melihat substansi hukumnya, tapi juga lihat sosial dan politiknya dan bagaimana penghargaan kepada masyarakat adat di Papua yang ada. Mereka turun-temurun tinggal di situ, namun tiba-tiba hutan mereka puluhan ribu hektare dibongkar begitu saja tanpa hak yang jelas," wantinya.

Untuk itu, politisi Golkar daerah pemilihan Papua Barat Daya ini berharap, sengketa lahan di Papua ini jadi pelajaran untuk ke depan agar Pemerintah hendaknya bertindak sebagai

fasilitator. Pemerintah bisa bertindak Pejabat Catatan Sipil yang berdiri di tengah-tengah antara investor dan masyarakat adat.

"Biarlah pemilik tanah dan investor ini berunding sendiri. Pemerintah cukup mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Bila perlu menjaga supaya kepentingan-kepentingan masyarakat adat ini bisa terpenuhi," ucapnya.

Jangan juga, lanjutnya, investor cuma datang ke Pemerintah, terus tidak melihat ke bawah, tiba-tiba izinnya keluar. "Amdahnya keluar. Padahal Amdal itu kan juga harus melibatkan masyarakat yang ada di situ," bilanginya.

Robert menilai, Pemerintah sebaiknya mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua. Tidak sekadar melayani pengusaha, tapi juga membela kepentingan masyarakat adat.

Untuk itu, dia mendesak negara untuk ikut agar semua izin hak guna usaha yang ada tanpa melibatkan masyarakat adat itu dibatalkan seluruhnya.

"Oke-lah kalau pelaku usaha mau kerja di Papua. Tapi Papua ini kan ada yang punya tanah, ya duduk bersama, bicarakan. Apakah penyertaan modal tanahnya itu dengan investor, bagi hasil atau bagaimana, tapi diselesaikan oleh mereka berdua (pelaku usaha dan masyarakat adat). Pemerintah cukup mengesahkan aturan, izinnya

saja," pesannya.

Sementara, anggota DPRD Provinsi Papua John NR Gobai mengatakan, di beberapa daerah di Papua memang terdapat ribuan hektare sawit yang ditanam oleh perusahaan-perusahaan yang diberikan izin.

Sayangnya, keberadaan perusahaan sawit ini malah memicu konflik dengan masyarakat setempat. "Ada yang mendukung, ada juga yang meminta perusahaan ditutup," katanya.

Menurutnya, pemicu konflik perusahaan sawit dan masyarakat lantaran penerimaan resmi dari sawit yang selama ini disetor ke pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah mendapat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah sawit dan minyak sawit yang keluar dari pohon sawit ditanam di tanah Papua.

"Mungkin kecil karena masuk ke kantong pribadi oknum pejabat," ujarnya.

Untuk meredam konflik di Papua ini, menurutnya, Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan izin untuk penambahan kebun sawit. Sebab nyatanya, kehadiran sawit telah merusak sumber kehidupan masyarakat.

Sawit juga telah merusak sumber hidup, sumber tanaman obat dari masyarakat. Yang lebih parah, kehadiran sawit malah membuat banyak daerah pinggiran banjir. ■ KAL